

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan ialah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar dari segi ekonomi masyarakat. Kemiskinan juga ditandai dengan adanya kekurangan pangan sehingga terjadinya kelaparan, sehingga imbas yang akan terlihat dari kelaparan tersebut ialah banyak masyarakat kekurangan gizi bahkan gizi buruk. Lain dari pada itu, kemiskinan juga ditandai dengan ketiadaan tempat tinggal sehingga tidak sedikit orang yang memilih tinggal dibawah jembatan dengan tidur beralaskan kardus atau koran bekas, dan kebanyakan dari mereka juga memilih pekerjaan dengan cara meminta-meminta dijalanan atau sering disebut dengan pengemis. Terkadang dari pada kegiatan sehari-harinya dihabiskan untuk sekolah, para masyarakat miskin lebih baik digunakan untuk mencari sesuap nasi dijalanan. Tanda lain dari kemiskinan ialah tidak memiliki pasokan akses air bersih yang

cukup seperti untuk kegiatan sanitasi atau MCK yang mana hal itu akan dilakukan oleh masyarakat setiap harinya, juga tidak memiliki aliran listrik atau penerangan untuk melakukan kegiatan di malam hari, tidak sedikit pula dari mereka yang masih menggunakan lampu berbahan dasar minyak tanah.<sup>1</sup>

**Tabel 1.1**

**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (2014-2019)**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab Pandeglang	113.14	124.42	115.90	117.31	116.16	114.09
Kab Lebak	115.83	126.42	111.21	111.08	108.81	107.93
Kab Tangerang	173.10	191.12	182.52	191.62	190.05	193.97
Kab Serang	71.38	74.85	67.92	69.10	64.46	61.54
Kota Tangerang	98.76	102.56	102.88	105.34	103.49	98.37
Kota Cilegon	15.53	16.96	14.90	14.89	13.96	13.20
Kota Serang	36.18	40.19	36.40	36.97	36.21	36.21
Kota Tangerang Selatan	25.29	25.89	26.38	28.73	28.21	29.16
<b>Provinsi Banten</b>	<b>649.19</b>	<b>702.40</b>	<b>658.11</b>	<b>675.04</b>	<b>661.36</b>	<b>654.46</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Banten 2014-2019*

---

<sup>1</sup> Indra Maipita, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2013), h. 8.

Dari data jumlah penduduk miskin diatas, secara keseluruhan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten selama 6 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 2 kali yaitu di tahun 2015 dan di tahun 2017, adapun jumlah kemiskinannya yaitu sebagai berikut, pada tahun 2014 kemiskinan berjumlah 649.19 (ribu jiwa), dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 702.40 (ribu jiwa), namun pada tahun selanjutnya jumlah penduduk miskin Banten kembali menurun menjadi 658.11 (ribu jiwa), akan tetapi ditahun ke empat penelitian, yaitu di tahun 2017 jumlah penduduk miskin Banten mengalami kenaikan kembali sebesar 675.04 (ribu jiwa), dan dua tahun setelahnya mengalami penurunan yang berkelanjutan. Sedangkan jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi di Kabupaten Tangerang sebesar 193.97 (ribu jiwa) pada tahun 2019, dan jumlah penduduk miskin terendah terjadi di Kota Cilegon sebesar 13.20 (ribu jiwa) pada tahun yang sama, yaitu tahun 2019. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah

penduduk miskin di Provinsi Banten senantiasa mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.

Selain dari pada itu, persentase penduduk miskin di Provinsi Banten juga mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Berikut ini adalah persentase penduduk miskin tingkat kabupaten/kota dari tahun 2014-2019 :

**Tabel 1.2**

**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota (2014-2019)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)</b>					
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kab Pandeglang	9.50	10.43	9.67	9.74	9.61	9.42
Kab Lebak	9.17	9.97	8.71	8.64	8.41	8.30
Kab Tangerang	5.26	5.71	5.29	5.39	5.18	5.14
Kab Serang	4.87	5.09	4.58	4.63	4.30	4.08
Kota Tangerang	4.91	5.04	4.94	4.95	4.76	4.43
Kota Cilegon	3.81	4.10	3.57	3.52	3.25	3.03
Kota Serang	5.70	6.28	5.58	5.57	5.36	5.28
Kota Tangerang Selatan	1.68	1.69	1.67	1.76	1.68	1.68
<b>Provinsi Banten</b>	<b>5.51</b>	<b>5.90</b>	<b>5.42</b>	<b>5.45</b>	<b>5.24</b>	<b>5.09</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Banten 2014-2019.*

Berdasarkan persentase penduduk miskin tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2014 sampai tahun 2019 senantiasa mengalami penurunan dan kenaikan, adapun persentase kemiskinannya yaitu sebagai berikut, pada tahun 2014 kemiskinan berjumlah 5,51%, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 5,90%, namun pada tahun selanjutnya jumlah penduduk miskin Banten kembali menurun menjadi 5,42%, akan tetapi ditahun ke empat penelitian, yaitu di tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Banten mengalami kenaikan kembali sebesar 5,45% dan dua tahun setelahnya mengalami penurunan yang berkelanjutan yaitu 5,24% dan 5,09%. Sedangkan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di Kabupaten Pandeglang sebesar 10.43% pada tahun 2015, dan pesentase penduduk miskin terendah terjadi di Kota Tangerang Selatan sebesar 1.67% pada tahun 2016.

Kemiskinan merupakan hal yang menjadi salah satu persoalan utama yang ada di Banten, karena tingkat kemiskinan yang ada di Banten sangat tinggi. Banyak masyarakat yang hidupnya serba kekurangan dan jauh dari kata berkecukupan.

Tidak sedikit masyarakat yang sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, jangankan untuk memikirkan perkara yang lain, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sangat kesulitan. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari masyarakat masih banyak yang kesulitan karena keluarganya kurang bahkan tidak mampu secara ekonomi. Kemiskinan terjadi karena disebabkan beberapa faktor dan kemiskinan juga menyebabkan tindak kriminal di Banten baik dari pencurian, pencopetan bahkan aksi bunuh diri.

Selain dengan mengamati jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten dan presentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten, tingkat kemiskinan juga dapat dilihat dari garis kemiskinan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Banten. “Garis kemiskinan diperoleh dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan nonpangan.”<sup>2</sup> Dengan demikian, melalui garis kemiskinan maka akan diketahui seberapa besar batas

---

<sup>2</sup> Ali Khomsan, dkk., (ed.) *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), Cetakan Pertama, h. 13.

kemiskinan sebagai tingkat minimum pendapatan yang harus terpenuhi untuk mendapatkan standar hidup yang layak atau cukup dan juga sebagai batas maksimum atas pengeluaran dalam setiap kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik untuk kebutuhan dapur, pakaian dan kendaraan. Berikut ini adalah tabel garis kemiskinan menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten:

**Tabel 1.3**

**Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (2014-2019)**

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (rupiah/kapita/bulan)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab Pandeglang	237.111	247.073	267.752	285.822	310.859	326.517
Kab Lebak	219.177	228.146	246.389	261.880	283.901	298.201
Kab Tangerang	351.789	372.431	405.902	423.486	451.325	476.636
Kab Serang	223.190	232.856	256.660	269.652	294.829	309.036
Kota Tangerang	421.554	455.228	496.349	508.551	556.782	584.318
Kota Cilegon	306.253	323.935	347.949	373.147	428.867	459.469
Kota Serang	242.977	255.614	281.926	296.819	350.237	379.641
Kota Tangerang Selatan	401.696	433.967	472.968	494.784	549.150	593.781
<b>Provinsi Banten</b>	<b>315.819</b>	<b>336.483</b>	<b>367.949</b>	<b>386.753</b>	<b>431.069</b>	<b>462.726</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Banten 2014-2019*

Berdasarkan data diatas, Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten senantiasa mengalami peningkatan secara berturut-turut selama 6 tahun, terhitung sejak tahun 2014-2019 yaitu senilai 315.819 (rupiah/kapita/bulan), 336.483 (rupiah/kapita/bulan), 367.949 (rupiah/kapita/bulan), 386.753 (rupiah/kapita/bulan), 431.069 (rupiah/kapita/bulan), 462.726 (rupiah/kapita/bulan). Dimana tingkat garis kemiskinan tertinggi berada di Kota Tangerang Selatan senilai 593.781 (rupiah/kapita/bulan) pada tahun 2019, dan tingkat garis kemiskinan terendah berada di Kabupaten Lebak senilai 219.177 (rupiah/kapita/bulan) pada tahun 2014.

Pengangguran sering terjadi di daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, dengan kepadatan penduduk yang tinggi sementara jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit maka terjadilah pengangguran. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan pemenuhan kebutuhan hidup dengan baik, kehidupan yang serba kekurangan, berujung semakin banyaknya kejahatan dan tindak kriminal. “Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan,



sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru”.<sup>3</sup> Masyarakat semakin sulit untuk meningkatkan kualitas kehidupan baik untuk dirinya sendiri, anak maupun keluarganya. Kehidupan yang serba kekurangan, jauh dari kata berkecukupan membuat hal ini bisa menimbulkan tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin tinggi karena pengangguran yang semakin meningkat, disebabkan hanya karena untuk makan masyarakat yang menganggur dan kebingungan akhirnya bertindak menyalahi norma-norma yang ada di masyarakat.

Pengangguran terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah pengangguran terbuka. “Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan.”<sup>4</sup> Dimana kondisi ini masyarakat sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan, bukan hanya karena potensi akademik atau *skill* yang dimiliki saja yang dilihat, tetapi daya serap tenaga kerja yang kurang memadai juga menjadi persoalan. Banyak masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Alam S, *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI 2*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 6.

<sup>4</sup> Alam S, *Ekonomi...* h. 9

akhirnya mengganggu dan menimbulkan permasalahan baru dan semakin kompleks yaitu masalah kemiskinan. Adapun cara menghitung Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT):

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

Dari rumus atau cara menghitung diatas, maka akan ditemukan hasil seberapa besar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam bentuk persentase. Berikut ini data mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten :

**Tabel 1.4**

**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (2014-2019)**

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (persen)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab Pandeglang	7.03	10.22	-	8.30	8.33	8.71
Kab Lebak	9.57	10.74	-	8.88	7.69	8.05
Kab Tangerang	8.45	9	-	10.57	9.70	8.91
Kab Serang	14.76	14.80	-	13	12.77	10.65
Kota Tangerang	7.81	8	-	7.16	7.40	7.13
Kota Cilegon	11.83	12	-	11.88	9.33	9.68

Kota Serang	10.03	9.49	-	8.43	8.16	8.08
Kota Tangerang Selatan	6.92	6.13	-	6.83	4.67	4.79
<b>Provinsi Banten</b>	<b>9.07</b>	<b>9.55</b>	<b>8.92</b>	<b>9.28</b>	<b>8.52</b>	<b>8.11</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Banten 2014-2019.*

Berdasarkan data diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota pada tahun 2014 sampai tahun 2019 senantiasa mengalami penurunan dan kenaikan, adapun persentase Tingkat Pengangguran Terbukanya yaitu sebagai berikut, pada tahun 2014 kemiskinan berjumlah 9,07%, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 9,55%, namun pada tahun selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten kembali menurun menjadi 8,92%, akan tetapi ditahun keempat penelitian, yaitu di tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten mengalami kenaikan kembali sebesar 9,28% dan dua tahun setelahnya mengalami penurunan yang berkelanjutan yaitu 8,52% dan 8,11%. Sedangkan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi di Kabupaten Serang sebesar 14.80% pada tahun 2015, dan pesentase Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) terendah terjadi di Kota Tangerang Selatan sebesar 4.67% pada tahun 2018.

Upah minimum ialah bayaran terendah untuk seorang karyawan yang bekerja disuatu perusahaan ataupun pelaku industri, dengan adanya upah minimum tersebut dapat menjadi rem atau batasan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan oleh pelaku industri tersebut dalam memberikan upah atau gaji. Sehingga hal tersebut pula dapat dijadikan tolak ukur seorang pekerja yang akan melamar disebuah perusahaan, apakah bayaran tersebut dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi timpang tindih antara pemasukan dan pengeluaran. Sedangkan “UMK adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota. UMK ditetapkan atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Wali Kota, selambat-lambatnya tanggal 21 November setiap tahunnya dan setelah penetapan UMP”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Aria Mulyapradana dan Muhammad Hatta, *Menjadi Karyawan Kaya Genius Mengetahui dan Mengelola Hak Keuangan Karyawan*, (Jakarta: Visimedia, 2016), Cetakan I, h. 23.

Berikut ialah tabel yang dapat menunjukkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten setiap bulannya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 :

**Tabel 1.5**  
**Upah Minimum Kabupaten/Kota (2014-2019)**

Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota per Bulan (Rupiah)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab Pandeglang	1.418.000	1.737.000	1.999.981	2.164.979	2.353.594	2.542.539,13
Kab Lebak	1.490.000	1.728.000	1.965.000	2.127.113	2.312.384	2.498.068,44
Kab Tangerang	2.442.000	2.710.000	3.021.650	3.270.936	3.555.835	3.841.368,19
Kab Serang	2.340.000	2.700.000	3.010.500	3.258.866	3.542.715	3.827.193,39
Kota Tangerang	2.444.301	2.730.000	3.043.950	3.295.076	3.582.077	3.869.717,00
Kota Cilegon	2.443.000	2.760.590	3.078.057	3.331.998	3.622.215	3.913.078,44
Kota Serang	2.166.000	2.375.000	2.648.125	2.866.595	3.116.276	3.366.512,71
Kota Tangerang Selatan	2.442.000	2.710.000	3.021.650	3.270.936	3.555.835	3.841.368,19
<b>Provinsi Banten</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.931.180</b>	<b>2.099.385</b>	<b>2.267.990</b>

*Sumber:*

*Badan Pusat Statistik (BPS) Banten 2014-2015;  
SK Gubernur Banten No. 561/Kep.553-Huk/2016;  
SK Gubernur Banten No. 561/Kep.442-Huk/2017;  
SK Gubernur Banten No. 561/Kep.318-Huk/2018; dan  
SK Gubernur Banten No. 561/Kep.305-Huk/2019.*

Berdasarkan data diatas, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi berada pada Kota Cilegon senilai Rp 3.913.078,44,- pada tahun 2019, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terendah berada pada Kabupaten Pandeglang senilai Rp 1.418.000,- pada tahun 2014, dan secara keseluruhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Banten senantiasa mengalami peningkatan terhitung sejak tahun 2014-2019 secara berturut-turut yaitu sebesar Rp 1.325.000,-, Rp 1.600.000,-, Rp 1.784.000,-, Rp 1.931.180,-, Rp 2.099.385,-, dan Rp 2.267.990,-.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dan belum ada penelitian yang mengkaji tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten serta kelengkapan data yang dimiliki, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2014-2019.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tentang Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mengalami kenaikan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2015 dan 2017.
2. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tentang Garis Kemiskinan di Provinsi Banten dari tahun 2014 sampai tahun 2019 terus mengalami kenaikan yang signifikan.
3. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mengalami kenaikan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2015 dan 2017.
4. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Banten senantiasa mengalami kenaikan yang signifikan, namun garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan ditahun 2015 dan 2017.

5. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) senantiasa mengalami peningkatan namun Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten masih saja mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2017.

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terfokus dan terarah sehingga tidak menyimpang dari sasaran pokok yang akan dianalisis. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian ini dengan batasan masalah sebagai berikut :

1. Fokus penelitian hanya mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Kemiskinan.
2. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
3. Tahun penelitian ini dilakukan mulai dari tahun 2014-2019.



#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2019?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2019?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) secara simultan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2019?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2019.

2. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2019.
3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) secara simultan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2014-2019.

#### **F. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta dapat memudahkan pembaca untuk mencari referensi dalam melakukan sebuah penelitian yang berkaitan tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengukuran terhadap kemiskinan.

### 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai pengangguran, upah dan kemiskinan khususnya pada kabupaten/kota di Provinsi Banten.

### 4. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, dapat dijadikan sarana pembelajaran untuk menganalisis mengenai masalah yang ada di Provinsi Banten baik tentang pengangguran, upah maupun kemiskinan. Sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Sebuah penelitian akan menjadi terfokus dan terarah karena kerangka pemikiran yang digunakan bisa terhubung antara variabel satu dan variabel lainya saling keterkaitan dengan fakta yang terjadi pada penelitian tersebut. “Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah riset”.<sup>6</sup> Sehingga dengan kerangka pemikiran, teori yang akan dibahas akan tersusun dengan baik sehingga tidak keluar dari sasaran yang akan diteliti.

Penelitian ini menganalisis tentang tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum kabupaten/kota terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2014-2019. Variabel Independen yang terdiri dari tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum kabupaten/kota, sedangkan variabel dependennya yaitu kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2014-2019. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada suatu wilayah yang padat penduduk namun lapangan pekerjaan yang ada didalamnya sangat sedikit, sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan akhirnya jalan pintaslah yang diambil seperti bunuh diri karena faktor ekonomi, banyaknya perceraian

---

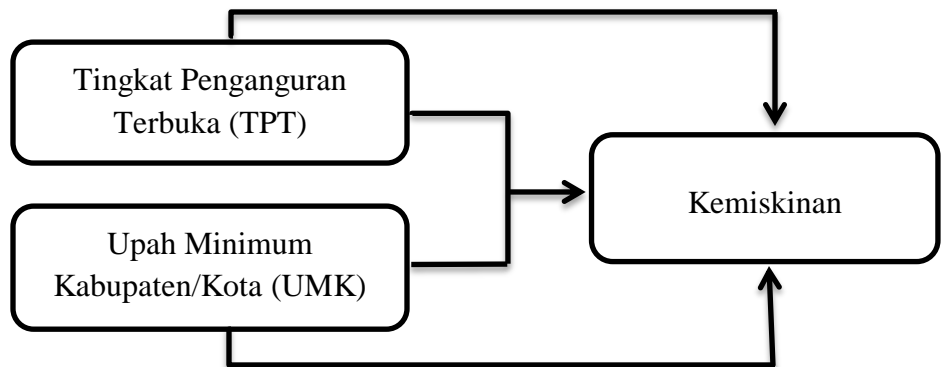
<sup>6</sup> Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 242.

akibat faktor ekonomi, maraknya tindak kriminal yang dapat merugikan banyak orang, kecemburuan sosial antara si miskin dan si kaya dan masih banyak lagi dampak negatif dari kemiskinan.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Tabel 1.6**

**Kerangka Pemikiran**



**H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab I pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, bab ini meliputi pemaparan atau uraian sistematis dari teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai variabel yang akan dibahas dalam penelitian, penjelasan mengenai hubungan antar variabel, dan hipotesa atau jawaban sementara yang harus di uji kebenarannya melalui penelitian dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III metode penelitian, bab ini meliputi penguraian secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV pembahasan dan hasil penelitian, bab ini meliputi uraian mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasannya analitis dan terpadu.

Bab V penutup, bab ini meliputi kesimpulan atau jawaban ringkas terhadap rumusan masalah yang diajukan, dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

